

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI DALAM *SUSTAINABILITY REPORT*

**YUNITA RATNASARI
ANDRI PRASTIWI, S.E., M.Si., Akt.**

ABSTRACT

The aim of this research is to examines the effects of certain Corporate Governance characteristics on the extent of corporate social responsibility disclosure in sustainability report. Disclosure of sustainability report by using the GRI indicators (Global Reporting Initiatives), which consists of six categories: economic, environmental, labor practices and decent work, human rights, society and product responsibility. The characteristics of Corporate Governance that was applied in this research are size of the Board of Commissioners, number of Board Commissionner meetings, proportion of independent Commissioners, Audit Committee size, and number of Audit Committee meetings.

The population of this research are listed companies in Indonesian Stock Exchange (IDX). The selection of this sample using purposive sampling method, that are companies which publishing sustainability report. Based on purposive sampling method, total sample in this research are 16 companies and using pooled data method there are 35 observations. The analysis tool to test the hypothesis is multiple regression analysis by using SPSS 17.0.

Results of this research indicate that Corporate Governance had no significant effect to sustainability disclosure. This research indicates that leverage variable had a negative significant effect to sustainability disclosure.

Keywords: Sustainability Report, CSR, Corporate Governance, The Board of Commissioners, Independent Commissioners, Audit Committee, Leverage.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan padahal kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, misalnya penggundulan hutan, polusi udara dan air, dan perubahan iklim.

Pada era ini, tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha. Sejak era reformasi bergulir, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran baru terhadap perusahaan tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Daniri, 2008). Selain itu, dorongan perusahaan untuk melaksanakan CSR adalah karena adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan".

Seiring dengan adanya perkembangan CSR, perusahaan mulai menyadari untuk mengungkapkan sebuah laporan yang tidak hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu kondisi keuangan perusahaan saja tetapi berpijak pada *triple bottom line*, yaitu selain informasi keuangan juga menyediakan informasi sosial dan lingkungan, yang kemudian disebut *sustainability report*. *Sustainability report* ini disusun dengan pedoman (standar) *Global Reporting Initiative* (GRI) yang telah dikembangkan sejak tahun 1990 dan disusun tersendiri terpisah dari laporan keuangan atau laporan tahunan.

Sustainability reporting semakin mendapat perhatian dalam praktek bisnis global dan menjadi salah satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Para pemimpin perusahaan-perusahaan dunia semakin menyadari bahwa pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (tidak hanya sekedar

laporan keuangan) akan mendukung strategi perusahaan. Selain itu dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap *sustainable development* (*CSR Quest* dalam Dilling, 2009). Pengungkapan *sustainability report* juga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan membangun legitimasi perusahaan.

Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Corporate Governance*, yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholders*-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007). Menurut Said *et.al.* (2009) *Corporate Governance* sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* telah dilindungi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan terhadap para *stakeholder*. Penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 2009).

2. TELAAH TEORI

2.1 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 2001). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghazali, 2007).

Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder*-nya adalah dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan serta dapat mengelola *stakeholder* agar mendapatkan dukungan oleh para *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

2.2 Teori Legitimasi

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Legitimasi suatu organisasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Asforth dan Gibs, 1990; Dowling dan Preffer, 1975; O'Donovan, 2002; dikutip dari Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat (Brown dan Deegan, 1998 dalam Michelon dan Parbonetti, 2010). Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat (Ulman, 1982; dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan perusahaan harus memiliki nilai-nilai sosial yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Ketika nilai-nilai yang dianut perusahaan berbeda dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai masyarakat sering disebut sebagai "*legitimacy gap*" dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Dowling dan Preffer, 1975 dikutip dari Ghozali dan Chariri, 2007).

Perwujudan legitimasi dalam dunia bisnis dapat berupa pelaporan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan mengungkapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang (Kiroyan, 2006; dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Deegan dan Cho dan Patten (2007) yang dikutip dari Michelon dan Parbonetti (2010) juga mengatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memperoleh legitimasi dengan mengungkapkan data-data dan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker, 1990; dalam Sayekti dan Wondabio, 2007).

Disamping itu, pengungkapan laporan sosial dan lingkungan menjadi salah satu cara perusahaan untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan investor. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan *image* dan pengakuan yang baik, bahwa perusahaan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga perusahaan akan memiliki daya tarik dalam penanaman modal. Hal tersebut didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa legitimasi sering kali dibangun dan dipertahankan dengan menggunakan aksi-aksi simbolis yang membentuk *image* perusahaan di mata publik (Dowling dan Pfeffer, 1975; Elsbach, 1994; Neu et al., 1998 dalam Michelin dan Parbonetti, 2010).

Selain itu, Ghozali dan Chariri (2007) juga mengatakan bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan baik dalam pengaruh yang baik maupun dampak yang buruk.

2.3 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai prinsipal (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Teori ini menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Saleh et al., 2008). Yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham atau investor sedangkan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan

tujuan dari masing-masing pihak. Dalam menjalankan tugasnya, manajer sebagai agen memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemilik perusahaan (prinsipal) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen serta adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan akan menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal. Pemisahan ini mengakibatkan setiap risiko yang ditanggung oleh perusahaan akan sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham karena manajer sebagai pengelola tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan untung maupun rugi perusahaan. Akibatnya, manajer akan mengambil tindakan yang dapat memperbaiki kesejahteraannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan pemegang saham.

Selain itu, teori agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi (*information asymmetric*). Manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (*earnings management*) untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya sehingga dapat merugikan para pemegang saham.

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. Penerapan konsep *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan.

2.4 Pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholder*-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR berusaha memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) Pertanggungjawaban sosial adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomitmen dengan ukuran keuntungan secara finansial saja, tetapi juga harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray *et.al.*, 1987 dalam Waryanto, 2010). Dengan mengungkapakan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan diharapkan perusahaan bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata melainkan perusahaan juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.

Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan dapat dilakukan dengan mengungkapkan hal tersebut ke dalam laporan tahunan perusahaan atau mengungkapkannya ke dalam laporan yang terpisah. Mengungkapkan laporan CSR ke dalam Laporan tahunan lebih lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Laporan tahunan merupakan alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pengungkapan dan pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat.

Namun, menurut Darwin, saat ini berkembang pelaporan perusahaan mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berdiri sendiri dan

terpisah dari laporan tahunan perusahaan, yang dikenal dengan *Sustainability Report* (SR). Perusahaan-Perusahaan di Indonesia yang sudah membuat *sustainability report* antara lain adalah PT Astra Internasional, PT Aneka Tambang, dan PT Bukit Asam. *Sustainability report* merupakan sebuah laporan yang tidak hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu kondisi keuangan perusahaan saja tetapi berpijak pada *triple bottom line*, yaitu selain informasi keuangan juga menyediakan informasi sosial dan lingkungan.

Menurut Witoelar (2005) ada beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*, antara lain: (1) Meningkatkan Citra Perusahaan, (2) Disukai Konsumen, (3) Diminati oleh Investor, (4) Dipahami oleh *Stakeholder*.

2.5 Corporate Governance dan Pengungkapan CSR

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang dikutip dari Surya dan Yustivandana (2006) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai berikut:

“Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specific the distribution of the right an responsibilities among different participants in the corporation such as board, manager, shareholders, and other stakeholders, and spells put the rules andf procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provide the structure through wich the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *corporate governance* merupakan sekumpulan hubungan antara perusahaan dan para *stakeholder*-nya (pemegang saham dan pihak lain yang terlibat dalam suatu perusahaan).

Faktor-faktor *corporate governance* juga dikorelasikan dengan tingkat pengungkapan informasi CSR. Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit,

kualitas auditor eksternal, dan struktur kepemilikan berkorelasi positif dengan pengungkapan CSR (Haniffa dkk, 2005; Sembiring, 2005; Anggraini, 2006).

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Komposisi dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktek dan pengungkapan CSR. Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.

Keberadaan dewan komisaris belum memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *Corporate Governance*, khususnya mengenai perlindungan terhadap investor. Untuk mendorong implementasi GCG, dibuatlah sebuah organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ-organ tambahan tersebut antara lain adalah dewan komisaris independen dan komite audit.

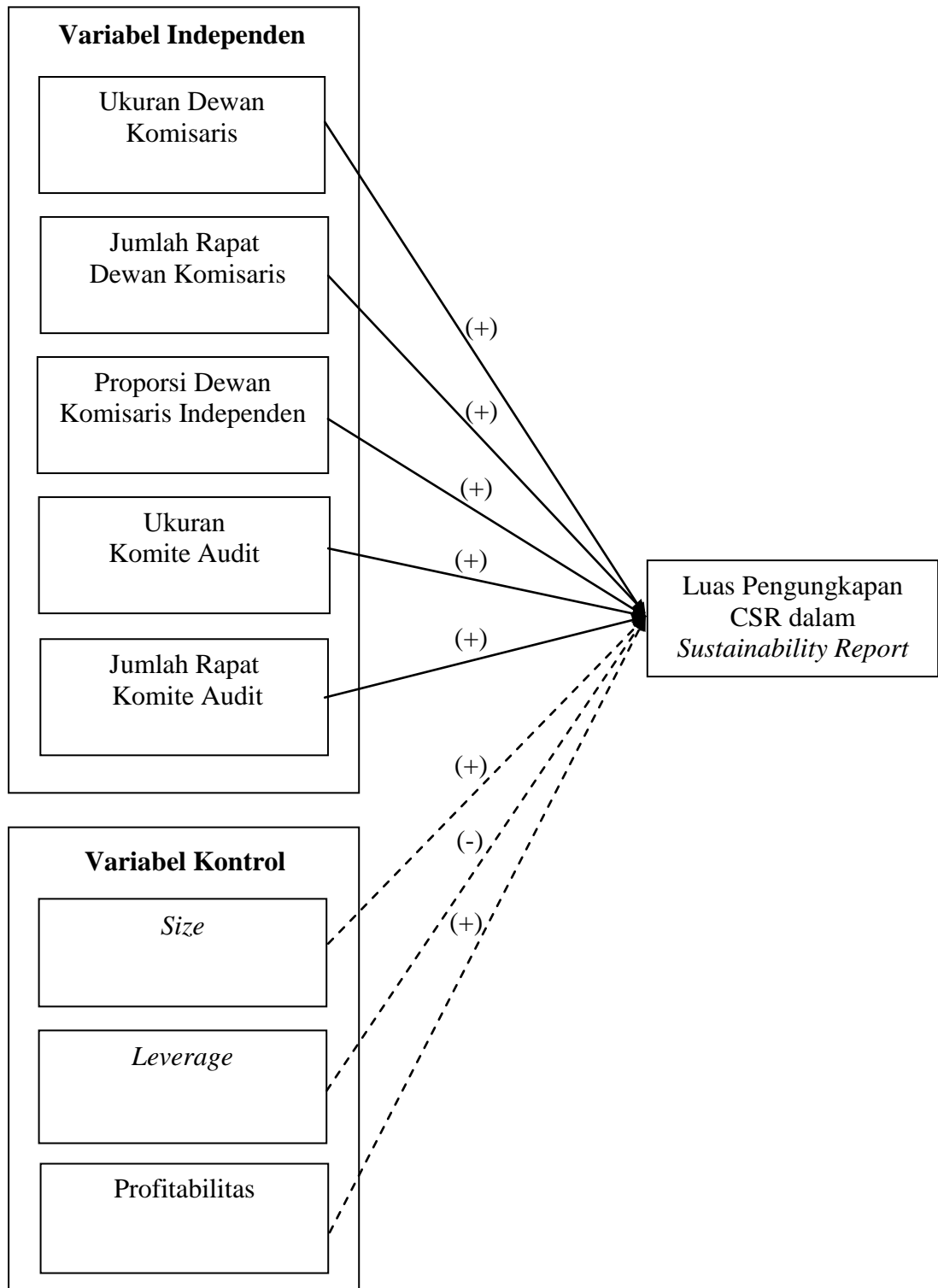
Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya.

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Said *et.al*, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001) dalam Said *et.al*. (2009) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dilakukan perusahaan.

2.6 Kerangka Teoritis

Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



2.7 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Luas Pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

Berdasarkan teori *stakeholder*, dewan komisaris merupakan sebuah mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi kepentingan para *stakeholder*, bukan hanya kepentingan pemegang saham (*shareholders*) (Hannifa dan Cooke, 2005 dalam Michelin dan Parbonetti, 2010). Untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial.

Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara ukuran dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

2.8 Hubungan Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Luas Pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut, akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002). Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat diharapkan *monitoring* (pengawasan) yang dilakukan oleh dewan komisaris akan semakin baik. Dengan demikian, pengungkapan informasi sosial perusahaan juga akan semakin luas.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Xie et al. (2003) dalam Waryanto (2010) yang menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan perusahaan akan semakin luas. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

2.9 Hubungan Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan Luas Pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris dalam dewan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Webb (2004) dalam Said, et.al (2009) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungannya karena hal tersebut dapat meningkatkan *image* perusahaan di mata masyarakat. Tricker (1984) dan Hanifa dan Cooke (2005) dalam Parbonetti (2010) menyatakan bahwa direktur independen berusaha mempublikasikan aktivitas perusahaan dan memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan laporan *sustainability* dalam rangka memastikan keselarasan antara keputusan organisasi, tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial dan legitimasi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

2.10 Hubungan Ukuran Komite Audit dengan Luas Pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Said *et.al*, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001) dalam Said *et.al*. (2009) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, dengan ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

2.11 Hubungan Jumlah Rapat Komite Audit dengan Luas Pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

Rapat komite audit merupakan koordinasi antara anggota-anggotanya agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG perusahaan. Dengan semakin sering mengadakan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2006-2009. Pemilihan tahun ini didasarkan pada fakta bahwa salah satu perusahaan di Indonesia mulai menerbitkan *sustainability report* pada tahun 2006, yaitu PT. Aneka Tambang, Tbk. (ANTAM). Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mempublikasikan *annual report* lengkap selama tahun 2006-2009.
2. Mempublikasikan *sustainability report* atau mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial lainnya selama tahun 2006-2009.
3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.2 Variabel dan Definisi Operasional

4.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan CSR dalam *sustainability report* yang dinyatakan dalam *corporate sustainability disclosure* (CSD). Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan proksi CSD (*Corporate Sustainability Disclosure*) berdasarkan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*). Indikator GRI terdiri dari 3 fokus pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai dasar sustainability reporting.

Pengukuran CSD yang menggunakan *content analysis*, yaitu sebuah metode pengkodifikasian sebuah teks (isi) dari sebagian tulisan ke dalam berbagai kelompok atau kategori berdasarkan pada kriteria tertentu (Webber, Weber, 1988 dalam Said, *et al.*, 2009). Metode ini telah diadopsi secara luas dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Abbot dan Monsen, 1979; Guthrie dan Parker, 1990; Hackston dan Milne, 1996 dalam Michelin dan Parbonetti, 2010). Analisis isi didasarkan pada pedoman GRI yang berfokus pada *triple bottom line* (pengungkapan kinerja

ekonomi, sosial, dan lingkungan). Metode ini pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSD adalah sebagai berikut:

$$\text{CSD} = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{79}$$

4.2.2 Variabel Independen

➤ Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran Dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

➤ Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat Dewan Komisaris adalah jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat Dewan Komisaris diukur dengan melihat jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris pada laporan tahunan perusahaan.

➤ Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustivandana, 2006). Proporsi Dewan Komisaris Independen diukur dengan rasio antara jumlah anggota Komisaris Independen dibandingkan dengan total anggota Dewan Komisaris.

➤ Ukuran Komite Audit

Ukuran Komite Audit merupakan jumlah seluruh anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan. Ukuran Komite Audit diukur dengan menghitung

jumlah anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

➤ **Jumlah Rapat Komite Audit**

Jumlah rapat Komite Audit adalah jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat Komite Audit diukur dengan melihat jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit pada laporan tahunan atau *sustainability report* perusahaan.

4.2.3 Variabel Kontrol

➤ **Size**

Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aktiva yang telah digunakan secara luas oleh peneliti terdahulu dalam area penelitian tentang *CSR reporting* (Hackston dan Milne, 1996; Hannifa dan Cooke, 2005; Said *et al.*, 2009). Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$SIZE = \ln (\text{total asset})$$

➤ **Leverage**

Leverage menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* adalah *Debt To Equity Ratio* (DER).

Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus :

$$Leverage = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

➤ **Profitabilitas**

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur

profitabilitas adalah *Return on Equity* (ROE) yang telah digunakan secara luas oleh peneliti terdahulu (Heckston dan Milne, 1996; Hannifa dan Cooke, 2005; Said *et al.*, 2009).

3.3 Metode Analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah kemudian dianalisis dengan alat statistik sebagai berikut:

➤ Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. (Ghozali, 2007). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

➤ Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2007). Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Goodness of Fit Model*. Uji *Goodness of Fit Model* digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual. Secara statistik, terdapat tiga cara untuk mengukur *goodness of fit*, yaitu dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah:

$$\text{CSD} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{DEKOM} + \alpha_2 \text{RAKOM} + \alpha_3 \text{KOMIND} + \alpha_4 \text{KOMDIT} + \alpha_5 \text{RADIT} \\ + \alpha_6 \text{SIZE} + \alpha_7 \text{LEV} + \alpha_8 \text{PROF} + \varepsilon$$

Keterangan:

CSD : Indeks Pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

DEKOM : Ukuran Dewan Komisaris

RAKOM : Jumlah Rapat Dewan Komisaris

- KOMIND : Proporsi Dewan Komisaris Independen
 KOMDIT : Ukuran Komite Audit
 RADIT : Jumlah Rapat Komite Audit
 SIZE : Ukuran Perusahaan dihitung dengan Ln Total Aset
 LEV : Rasio Leverage (*Debt to Equity Ratio*)
 PROF : Profitabilitas Perusahaan dilihat dari ROE (*Return on Equity*)
 ε : Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu variabel penelitian. Alat yang digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi variabel penelitian adalah nilai teoritis, nilai akhir (rata-rata, minimum, maksimum), sum dan standard deviasi yang tersaji pada tabel 1.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSD	35	.15	1.00	.4997	.29317
DEKOM	35	5	10	6.66	1.862
RAKOM	35	2	48	13.89	12.273
KOMIND	35	.30	.80	.4686	.12384
KOMDIT	35	3	9	4.40	1.735
RADIT	35	4	34	14.26	9.153
SIZE	35	20.82	26.40	23.4700	1.28365
LEV	35	.10	2.37	1.0754	.62145
PROF	35	.02	.78	.2960	.20633

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Ringkasan mengenai hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 2, 3, dan 4.

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^p

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.631 ^a	.398	.213	.24062	2.076

a. Predictors: (Constant), LogPROF, LogKOMIND, LogLEV, LogKOMDIT, LogDEKOM, LogSIZE, LogRADIT, LogRAKOM

b. Dependent Variable: LogCSD

Tabel 3
Hasil Uji F

ANOVA^p

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.996	8	.124	2.150	.037 ^a
	Residual	1.505	26	.058		
	Total	2.501	34			

a. Predictors: (Constant), LogPROF, LogKOMIND, LogLEV, LogKOMDIT, LogDEKOM, LogSIZE, LogRADIT, LogRAKOM

b. Dependent Variable: LogCSD

Tabel 2
Hasil Uji t (t test)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keputusan Terhadap Hipotesis
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.062	3.355		.317	.754	
	LogDEKOM	-.058	.518	-.024	-.113	.911	Ditolak
	LogRAKOM	-.082	.223	-.120	-.368	.716	Ditolak
	LogKOMIND	.772	.479	.299	1.612	.119	Ditolak
	LogKOMDIT	-.118	.414	-.067	-.285	.778	Ditolak
	LogRADIT	.383	.294	.422	1.303	.204	Ditolak
	LogSIZE	-1.045	2.699	-.091	-.387	.702	-
	LogLEV	-.354	.149	-.443	-2.373	*.025	-
	LogPROF	-.033	.122	-.045	-.272	.788	-

a. Dependent Variable: LogCSD

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Luas Pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa karakteristik *Corporate Governance* yang dilihat dari ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*.

Ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Erwansyah (2009), Said, et al. (2009) dan Waryanto (2010), yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR dalam *annual report*. Selain itu, penelitian Akhtaruddin et.al (2009) juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran komite audit dengan tingkat pengungkapan sukarela.

Ditolaknya hipotesis ini adalah dimungkinkan karena jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kompleksitas perusahaan. Hasil penelitian ini juga mencerminkan bahwa rata-rata komite audit adalah 4,40 atau dapat dikatakan ukuran komite audit perusahaan masih rendah, sehingga belum mampu mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, dalam melakukan fungsi pengawasan, efektivitas mekanisme pengawasan dewan komisaris tidak tergantung pada besar kecilnya ukuran dewan komisaris. Kemampuan manusia untuk berdiskusi dan bernegosiasi adalah terbatas. Ukuran dewan komisaris yang terlalu besar akan dapat membuat proses mencari kesepakatan dan membuat keputusan menjadi sulit, panjang, dan “bertele-tele” sehingga dewan komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif (Muntoro, 2006).

Dalam menentukan jumlah anggota dewan komisaris dan komite audit harus diperhatikan mengenai komposisi, kemampuan, dan integritas anggota

sehingga mampu memberikan arahan kepada manajemen dengan baik untuk mencapai transparansi dan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan (CSR) yang lebih luas. Dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2010) yang menunjukkan temuan bahwa tidak terdapat hubungan antara frekuensi pertemuan dewan komisaris dengan pengungkapan informasi sosial perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Widowati (2009) yang menyatakan bahwa jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit tidak menjamin bahwa pelaksanaan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan akan berjalan efektif.

Hal ini terjadi dimungkinkan karena rapat-rapat yang dilakukan kurang efektif, dikarenakan adanya dominasi suara dari anggota dewan komisaris dan komite audit yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan (Muntoro, 2006). Selain itu, hal ini juga mungkin terjadi karena kurangnya kurangnya kompetensi yang memadai dari anggota dewan komisaris dan komite audit sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif (Waryanto, 2010).

Proporsi dewan komisaris independen juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Said et.al (2009) dan Michelon dan Parbonetti (2010) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara proporsi komisaris independen dengan luas pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris pada perusahaan sampel masih rendah, sehingga kemampuan komisaris independen dalam memantau perilaku dewan direksi (manajemen) belum maksimal. Hal ini terlihat dari rata-rata jumlah komisaris

independen dalam dewan komisaris pada perusahaan sebanyak 46,86% dari total anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan belum berpengaruh dalam pemantauan kualitas pengungkapan finansial dan tanggung jawab sosial perusahaan.

4.2.4 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Luas Pengungkapan CSR dalam *Sustainability Report*

Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (*Size*), *leverage*, dan profitabilitas. Dari ketiga variabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel *leverage* yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung teori agensi dan hasil penelitian Waryanto (2010) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap luas pengungkapan informasi sosial perusahaan. Berdasarkan teori agensi, manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*.

Menurut Belkaoui dan Karpik (1989), semakin tinggi tingkat *leverage* semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba yang lebih tinggi yang dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial.

4.4 Ringkasan Pengujian Hipotesis

Ringkasan mengenai hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

H ₁	Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dalam <i>Sustainability Report</i>	Ditolak
H ₂	Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dalam <i>Sustainability Report</i>	Ditolak
H ₃	Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dalam <i>Sustainability Report</i>	Ditolak
H ₄	Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dalam <i>Sustainability Report</i>	Ditolak
H ₅	Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dalam <i>Sustainability Report</i>	Ditolak

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam *sustainability report* yang dilihat dari ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat, dan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik *Corporate Governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*.

Faktor ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas secara bersama-sama mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial hanya sebesar 21,3%. Dengan demikian faktor-faktor karakteristik *Corporate Governance* masih belum dapat meningkatkan pengawasan yang baik untuk mendorong pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) yang lebih luas.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata

variabel kontrol *leverage* berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sekaligus dapat merupakan arah bagi penelitian yang akan datang antara lain :

1. Jumlah sampel yang relatif terbatas, hanya 35 sampel karena masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang membuat *sustainability report*.
2. Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam kategori yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti.
3. Penelitian ini mengukur pengungkapan CSR hanya melalui standar GRI saja, dan tidak melihat kualitas pengungkapan CSR itu sendiri.
4. Tingkat *Adjusted R²* yang rendah dari model yang diuji dalam penelitian ini, yaitu sebesar 0,319 menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam *sustainability report*.

5.3 Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Saran untuk perusahaan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman, diharapkan untuk tahun-tahun ke depan mempunyai undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk membuat *sustainability report* perusahaan.
2. Pemerintah hendaknya menetapkan regulasi yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai praktik pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia sehingga praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia semakin meningkat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mengukur pelaporan tanggung jawab sosial dari luas pengungkapannya saja, akan tetapi kualitas pengungkapan juga dipertimbangkan didalamnya.

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan menggunakan variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fr. RR. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Jakarta)". *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang, 23-26 Agustus.
- Ardana, I Komang. 2008. "Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial." *Buletin Studi Ekonomi*. Volume 13, Nomor 1, Tahun 2008 hal 32-39.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Bapepam. 2000. *Surat Edaran Bapepam*. No.SE-03/PM/2000 Tentang Komite Audit.
- _____. 2004. *Surat Keputusan Ketua Bapepam*. Kep 29/PM/2004.
- Broberg, Pernilla., Torbjorn Tagesson, dan Sven-Olof Colin. 2009. "What Explain Variation In Voluntary Disclosure? A Study Of The Annual Reports Of Corporations Listed On Stockholm Stock Exchange". *Springer Science & Business Media*. 23 Juli 2009.
- Daniri, Mas Achmad. 2008. "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". <http://www.madani-ri.com>, Diakses tanggal 17 November 2010.
- Darmawati, Deni, Khomsiyah dan Rika Gelar Rahayu. 2005. "Hubungan *Corporate Governance* dengan Kinerja Perusahaan". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.8, hal. 68-65, Januari.
- Darwin, Ali. 2004. "Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia". *Konvensi Nasional Akuntansi V*. Yogyakarta, 13-15 Desember.
- Dilling, Petra F.A. 2009. "Sustainability Reporting In A Global Context: What are The Characteristics Of Corporation That Provide High Quality Sustainability Reports-An Empirical Analysis". *International Business & Economics Research Journal*. Vol.9, No. 1, hal. 19-29, Januari.
- Forum Corporate Governance Indonesia. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jakarta.
- Freeman, R.E. dan J. McVea. 2001. "A Stakeholder Approach to Strategic Management". http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=263511. SSRN. Diakses tanggal 20 Desember 2010.

- Galbreath, Jeremy. 2010. "How Does Corporate Social Responsibility Benefit Firms? Evidence From Australia". *European Business Review*. Vol.22, No. 4, hal. 411-431.
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiatives (GRI). 2006. *Sustainability Reporting Guidelines*. www.globalreporting.org/guidelines/062006guidelines.asp. Diakses tanggal 17 November 2010.
- Hendriksen, Eldon S., dan Michael F. Van Breda. 2000. Teori Akunting terjemahan dari *Accounting Theory*. Interaksara: Jakarta.
- Hoesana, Jan. 2007. "Menuju Era Baru Pelaporan Kelestiaan (Sustainability Reporting) Pada Akuntan Finansial yang Berdimensi Ekonomik, Sosial, dan Lingkungan". *Media Akuntansi*. Edisi 59, Juni 2007.
- Jalal. 2007. "Tentang Laporan Keberlanjutan Perusahaan". *Lingkar Studi CSR*. Jakarta. Diakses tanggal 20 Desember 2010.
- Jensen, Michael C., dan Meckling William H. 1997. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, Ownership and Structure". *Journal of Financial Economics* 3. Hal: 305-306.
- Khan, Md. Habib Uz-Zaman. 2010. "The Effect Of Corporate Governance Elements On Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting Empirical Evidence From Private Commercial Banks Of Bangladesh". *International Journal Of Law and Management*. Vol.52, No. 2, hal 82-109.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Michelon, Giovanna dan Antonio Parbonetti. 2010. "The Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosure". *Springer Science & Business Media* 14 September 2010.
- Mulyadi. 2002. *Auditing: Jilid 1 Edisi Enam*. Jakarta: Salemba Empat.

- Muntoro, Ronny Kusuma. 2006. Makalah “Membangun Dewan Komisaris yang Efektif”.
- Nurkhin, Ahmad. 2009. “Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia).” Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro
- Said, Roshima., Yuserrie Hj Zainuddin, dan Hasnah Haron. 2009. “The Relationship between Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies”. *Social Responsibility Journal*. Vol.5, No.2, hal. 212-226.
- Sayekti dan Wondabio. 2007. “Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earnings Response Coefficient”. *Simposium Nasional Akuntansi 10*. Makasar.
- Sembiring, E. R. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". *Simposium Nasional Akuntansi 8*. Solo, 15-16 September.
- Surya, Indra dan Ivan Yustivandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: Kencana.
- Waryanto. 2010. “Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) di Indonesia”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Witoelar, Rahmat. 2005. “Sustainability Reporting Arti Penting Bagi Perusahaan dan Bagaimana Peran Akuntan”. *Media Akuntansi*. Ed. 47 Th. XII, Juli 2005.

www.csrindonesia.com